

ABSTRAK

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA PEMERINTAH ACEH)**

Oleh :

Rusman Rahman, SE, MSi, Ak

Dedi Yunaedi

(Dosen Tetap STIES Banda Aceh)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan daerah pada Pemerintah Aceh, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metode pengumpulan data adalah survey, sedangkan jenis data berbentuk primer berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subjek penelitian secara individual. Responden penelitian adalah Pegawai Biro Keuangan pada Pemerintah Aceh sebanyak 35 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan *uji-t one sample*., yaitu uji hipotesis terhadap variable mandiri..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh telah disajikan dengan mengacu standar akuntansi pemerintahan, namun perlu ditingkatkan antara lain kelengkapan komponen laporan keuangan yang disajikan, karakteristik kualitatif dan mempublikasikan secara transparan dan akuntabilitas kepada public, sesuai Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.. trtsng Standar Akuntansi.

Kata kunci : Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT IN LOCAL PUBLIC SECTOR ORGANISATION (STUDY OF THE GOVERNMENT OF ACEH)

By :

Rusman Rahman, SE,MSi,Ak

Dedi Yunaedi

Dosen Tetap STIES Banda Aceh

This research's purpose is to know the presentation of local financial statement in the government of Aceh, either it's already suitable with the government accounting standard which is stated in the Government's regulations no. 71 in the year of 2010. The method of the data collecting that was used in this research is survey, while the type of data is in the form of subjective data that shows opinion, behaviour, experience or characteristics of research subjects individually. The respondents of this research which consist of 35 people are the employees of the Financial Bureau of Aceh. The analytic method that was used in this research is *Quantitative descriptive* by using *t-test one sample* which is hypothetic test for independent variable.

The result of this research shows that the presentation of local finance statement in the government of Aceh has presented in accordance to the government accounting standard, but needs to be improved on the completeness of the statement's component that is presented, the qualitative characteristic, publishing in a transparent manner, and accountability to public, in accordance to Attachment II of the government's regulations No.71 in the year of 2010 about the Standard of Accounting.

Keywords : Presentation of financial statement, the government standard of accounting

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi di setiap Negara seluruh dunia pasti menuntut pemerintahan yang bersih atau *good government governance* termasuk Indonesia. Dengan bergulir otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ke daerah Hal tersebut di tandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,. Selain itu diiringi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas merupakan langkah konkrit Pemerintah Pusat memberikan otonomi (peluang) yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasn masing-masing daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawaban pengelolaan dana melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Nurlan, 2007:239). Laporan keuangan daerah dimaksud disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut bahwa laporan keuangan daerah berupa realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, perubahan ekuiti dan catatan laporan keuanan. . Laporan keuangan disajikan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diakses oleh public/masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, kaena publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan untuk melakukan evaluasi pemerintah (Mulyana, 2006).

Pemerintah Aceh diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2005. Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Aceh telah menyampaikan laporan keuangan pertanggungjaawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan kepada masyarakat setiap tahun, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah Aceh dan menjadi sarana komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan masyarakat.

Namun, penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat dilihat bahwa kesesuaian penyajian angka-angka laporan keuangan, kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan Laporan keuangan dan system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Hasil Pemeriksaan BPK, 2011) Disamping itu, Hasil Pengawasan Intern BPKP merekomendasikan bahwa : secara umum beberapa faktor yang menyebabkan penyajian laporan keuangan belum memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah karena penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, lemahnya system pengendalian intern, belum tertata barang milik negara/daerah sepenuhnya dengan tertip, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku dan kurang memadai kapasitas SDM pengelola keuangan daerah. (Hasil Pengawasan BPKP atas Penyajian Laporan keuangan, Tahun 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauhmana penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra (2006:135-139) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memuat beberapa hal sebagai berikut :

Kedudukan Pelaporan Keuangan Pemerintah adalah :

1. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “Laporan Keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.
2. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. KSAP mendorong penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan

bertujuan khusus apabila diperlukan. Selanjutnya Indra mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempunyai kedudukan :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
2. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan juga adanya upaya pengharmonisan atas berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

Karakteristik Kualitattif Laporan keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

- 1) Relevan,
- 2) Andal.
- 3) Dapat dibandingkan dan,
- 4) Dapat dipahami.

Keempat karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Relevan:

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan-keputusan Dengan informasi laporan keuangan yang relevan dapat dibandingkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat unpan balik.
- b) Memiliki manfaat prediktif
- c) Tepat waktu,
- d) Lengkap.

Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a) Penyajian jujur,
- b) Dapat diverifikasi,
- c) Netralitas.

Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Unsur Laporan keuangan Daerah

Menurut PP 71 tahun 2010, lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua, bahwa komponen-komponen Laporan Keuangan pokok disajikan setidaknya terdiri 4 jenis laporan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Selain laporan keuangan pokok tersebut Pemerintah Daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : laporan kinerja keuangan daerah dan laporan perubahan ekuitas dana.

Menurut pendapat Deddi (2008:153) bahwa unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari :

PP 71 tahun 2010, yaitu :

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas
4. Pendapatan
5. Belanja
6. Pembiayaan

7. Laporan Arus Kas

2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Dalam Muindro (2010;273) menyatakan bahwa di pasal 4 , PSAP sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat1 terdiri dari :

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sebaigamana di tetapkan dalam lampiran III;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana di tetapkan dalam lampiran IV;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, adalah sebagaimana di tetapkan dalam lampiran V;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagaimana di tetapkan lampiran VI;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akutansi Persediaan, adalah sebagaimana di tetapkan dalam lampiran VII;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, adalah bagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII; dan
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIII.

2 4. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudan *good*

governance (Ulum, 2004). Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu (BPKP, 2006): (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

Transparansi adalah *memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan* (SAP, 2005).

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret, Secret, Confidential* dan *Restricted*, dan Official Secrets Acts membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan Shende dan Bennet (2004) dalam Mulyana (2006).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2008). Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental accountability

in based on the belief that the citizenry has a "right to know," a right to receive openly declared facts that my lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government's duty to be publicly accountable in a democratic society. (par. 56).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. *Concepts Statement No. 1* menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

2.5. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode (PP No. 71 Tahun 2010). Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:84) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap factor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menentukan/merusukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : Penyajian Laporan Keuangan Pada Pada Pemerintah Aceh belum dilaksanakan secara optimal sesuai lapiran II PP No. 71 Tahun 2010.

3. METODE PENELITIAN

3.2. Metode Populasi dan Sampel

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Sugiyono, 2008:74). Dalam penelitian ini, populasi penelitian mengacu pada seluruh pegawai Biro Kruangan pada Pe,merimtah Aceh dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pejabat struktural dilingkungan Bitor Keuangan Pemerintah Aceh.
2. Pegawai berstatus pegawai tetap atau PNS Biro keuangan Pemerintah Aceh.

Dari kcriteria yang telah ditetapkan, jumlah pegawai keuangan yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 35 orang, Karena jumah populasi relative kecil, maka digunakan metode sensus, yaitu semua elemen populasi dijadikan sampel penelitian. (Sugiyono, 2008:84)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden. Dan menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan. Skala pengukuran penelitian dilakukan dengan *skala likert*, dimana skala ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 sampai 5. Skala pengukuran ini dipilih peneliti agar responden memiliki kesempatan atau keleluasaan yang lebih besar (nilai maximum 5) dalam memberikan penilaian yang sesuai dengan persepsi dan kondisi yang mereka alami.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variable	Indikator	Ukuran	Skala
Analisis Penyajian Laporan Keuangan	Penyajian Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010)	1. Tepat waktu 2. Lengkap 3. Publikasi. 4. Akurat/Jujur 5. Transparan.. 6. Akuntabilitas	1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 - 5	Interval Intrval Interval Interval Interval Interval

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis hipotesis diskriptif. Menurut Sugiyono (2008:147) mengatakan bahwa hipotesis dekriptif yang diuji dengan statistic parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sample dibandingkan dengan standar. Selanjutnya Sugiyono mengatakan untuk menguji hipotesisi deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk rasio atau interval maka digunakan t-test satu sampel.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Sugiyono tersebut, maka penulis dapat menentukan langkah-langkah Pengujian hipotesis sebagai berikut:

- 1) Membuat tabulasi data sesuai dengan jawaban responden terhadap variabel penelitian yang digunakan. Tabulasi data ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan.
- 2) Menentukan apa yang diharapkan, yaitu menentukan jumlah skor ideal (yang diharapkan) yaitu responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi,

- 3) Menentukan uji t-test satu sampel (menggunakan alat bantuan SPSS untuk mengetahui sejauh mana hipotesis diketahui kebenarannya yaitu :

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesisi :

- Jika t hitung $<$ t tabel, maka penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh belum optimal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- Jika t -hitung $>$ t -tabel, maka penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Aceh sudah optimal/ sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan..

4. HASIL DAN BAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen Data

Uji Reliabilitas dan uji Validitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Cronbach Alpha* sedangkan uji validitas menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Hasilnya sbb :

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliability dan Validitas

Reliability Statistics				
	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>		
	0.867	6		
Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BUTIR 1	8.5714	4.840	.859	.827
BUTIR 2	8.5429	4.667	.912	.817
BUTIR 3	8.3429	3.232	.871	.815
BUTIR 4	8.3714	4.829	.543	.866
BUTIR 5	7.6571	5.055	.588	.858
BUTIR 6	7.2286	4.887	.494	.875

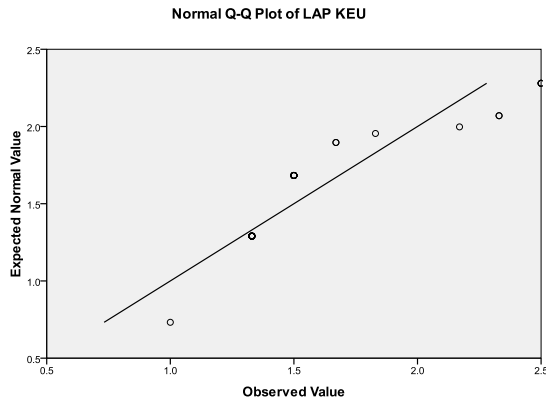
Dari tabel tersebut, hasil Uji Reliabilitas dan Validitas sebagai berikut :

1. Pada bagian *Reliabilitas Statistic* terlihat bahwa nilai *Alpha Cronbachs* hitung 0.8670 > 0.2407 pada taraf kepercayaan 95% atau probabilitas signifikan 0.05 % atau Total *Alpha Cronbachs* diatas 50 %, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari kuesioner adalah sangat reliable yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.
2. Pada *Item Total Statistic*, Nilai *Corrected Item Total Correlation* (*r*) hitung > *r* tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir yang ada dalam kuesioner (butir 1 sampai dengan 6) dapat dinyatakan valid.

2) Uji Normalitas

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *statistic parametris*, maka data-data setiap variable harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Bila data setiap variable tidak normalitas maka pengujian hipotesis tidak bias menggunakan *statistic parametris*. (Sugyanto, 2008:173). Analisis grafik dilakukan dengan melihat *grafik histogram* yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal atau grafik *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusan norma tersebut : jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. (Ghozali, 2005:110). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar .:

Gambar 4.1



Dari hasil uji tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari Gambar diatas disimpulkan bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Dari hasil uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan berdistribusi normal.

4.2 . Pengujian Deskriptif.

Untuk menguji hipotesisi dalam penelitian ini berupa pengujian hipotesis deskriptif bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pada Pada Pemerintah Aceh) belum dilaksanakan secara optimal sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t *one sample*. Alat bantu yang dipakai adalah program SPSS (*Statistical Program For Social Science*) Hasil uji t *one sample* :

One-Sample Test

Test Value = 5					
t	Df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
				Lower	Upper

One-Sample Test

Test Value = 5						
t	Df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
				Lower	Upper	
PNYJ.LA	-47.199	34	.000	-3.37743	-3.5228	-3.2320
P KEU						

Dari uji one sampel test dapat dilihat bahwa t hitung -47.199 (negatif) yaitu t hitung (-47.199) lebih kecil dari t tabel (1.980) $(-47.199 < 1.980)$. Berarti hipotesis diterima, bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh belum optimal, sesuai standar akuntansi pemerintahan. yaitu penyajian laporan keuangan tidak tepat waktu laporan, data kurang akurat dan unsur/komponen laporan keuangan belum memadai, sebagaimana yang dimasalahkan dalam pada pendahuluan .

Ini berarti bahwa kelemahan penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh disebabkan kurang akurat data yang disajikan dalam laporan keuangan, penyajian laporan keuangan sering terlambat, unsure laporan keuangan yang disajikan belum memadai. Tentu kelemahan ini, sudah pasti disebabkan rendah kualitas manajemen sumber daya manusianya yang mengerjakan laporan keuangan

Selain itu, dapat dipahami bahwa informasi keuangan yang disajikan melalui laporan keuangan Pemerintah Aceh selama ini kurang relevan. Apabila informasi ini digunakan untuk ambil keputusan maka keputusan akan menjadi tidak uptodate, sehingga akan memberikan hasil output) yang kurang maksimal.

Disamping itu kelemahan laporan keuangan tersebut, diprediksi akan mengurangi minat investor untuk menanamkan dananya ke Aceh, karena investor menganggap bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh belum *good governance*, sehingga mereka merasa enggan untuk investasi bisnis di Aceh. Apalagi variable keamanan di Aceh belum stabil dan masih rawan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan : Pemerintah Aceh sebagai salah satu Organisasi Sektor Publik di Provinsi Aceh belum optimal sebagaimana yang diharapkan standar akuntansi pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Hal ini ditunjukkan hasil uji t hitung -47.199 (negatif) lebih kecil dari tabel (1.980) ($-47.199 < 1.980$).

Saran-saran

Disarankan kepada Pemerintah Aceh, untuk menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh sesuai standar akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, karena informasi keuangan Pemerintah ini, investor akan menilai *good governance* Pemerintah Aceh. Hal ini sangat penting bagi investor tertarik berinvestasi di Aceh. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Aceh meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga penyajian laporan keuangan berdasarkan skruar basis sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada tahun 2015 benar-benar dapat dilaksanakan.ng.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Abdul Hafiz Tanjung, (2009), *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Deddi, Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Deddi, Nordiawan dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Ghozali, Imam, 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Kurniawan, Agung (2005) **Transformasi Pelayanan Publik**, Pembaruan, Yogyakarta.

Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta

Muindro, Renyowijoyo, (2010), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta.

Mahmudi, (2005), **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Moenir, H.A.S., (2006), **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**, Bumi Aksara, Jakarta.

Nofria, Melsi. 2006. Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Nurlan, Darise, (2007), *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)*, Penerbit : PT Indeks, Jakarta.

Priyanto, D., (2008), **Mandiri Belajar SPSS**, Medikom, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., Penerbit Salembat Empat, Jakarta.

Sugiyono, (2008), **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta IKAPI, Bandung.